**TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN DAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI PERKAWINAN DIKAJI MENURUT PASAL 263 DAN
PASAL 264 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**

Pahmi Syaripudin

Kementrian Agama Kabupaten Sukabumi

E-mail: pahmigodzilla73@gmail.com

Masuk: Oktober 2020

Penerimaan: November 2020

Publikasi: Januari 2021

ABSTRAK

Proses pendaftaran dan pencatatan perkawinan dapat terjadi pemalsuan dokumen dan persyaratan administrasi perkawinan. Pemalsuan dokumen dan persyaratan administrasi perkawinan yang berbentuk surat merupakan tindak pidana yang dapat diancam dengan Pasal 263 dan Pasal 264 kitab Undang-Undang Hukum pidana. Selain itu suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, didasarkan pada alasan karena berkaitan dengan "Tindak Pidana Pemalsuan dokumen dan Persyaratan Administrasi Perkawinan Dikaji Menurut Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen dan syarat administrasi perkawinan adalah Surat-surat tidak lengkap, calon mempelai masih dibawah umur, salah satu calon masih terikat perkawinan dengan pihak lain dan tertipu pihak lain. Tindak pidana pemalsuan dokumen dan syarat administrasi perkawinan dapat berakibat pada dituntutnya pelaku dengan Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP dan juga dapat berakibat batalnya perkawinan. kemudian masyarakat yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Dokumen; Pemalsuan; Perkawinan; Pidana.

ABSTRACT

The process of registration and registration of marriage can occur falsification of documents and requirements of marriage administration. Forgery of documents and requirements of marriage administration in the form of a letter is a criminal offense that can be threatened with Article 263 and Article 264 of the Criminal Law Law book. In addition, a marriage can be annulled if it does not meet the conditions and pillars. This study uses a normative legal research approach, based on the reasons it relates to "Criminal Counterfeiting of Documents and Terms of Marriage Administration Reviewed in accordance with Article 263 and Article 264 of the Criminal Law Law Book." Based on the results of the research shows that the background of the crime of forgery of documents and the requirements of marriage administration are Incomplete Letters, the bride and groom are still underage, one of the candidates is still tied to the other party and deceived by the other party. Criminal forgery of documents and conditions of marriage administration may result in the claim of the perpetrator with Article 263 and Article 264 of the Criminal Code and may also

result in the annulment of the marriage. then the affected community can follow the legal path in accordance with applicable laws.

Keywords : *Document; Counterfeiting; Marriage; Criminal.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang sangat sesuai dengan fitrah manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan biologisnya, namun demikian, manusia dalam melaksanakan kebutuhan tersebut harus sesuai dengan norma dan kaidah hukum perkawinan itu sendiri, hal ini dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk mulia dan sempurna.

Guna melangsungkan suatu perkawinan yang akan memiliki konsekuensi terhadap keabsahan dan juga hak dan kewajiban suatu perkawinan juga diperolehnya hak-hak keperdataan, maka suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh ketentuan agama maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memenuhi ketentuan tersebut, maka perkawinan yang dilangsungkan itu menjadi sah hukumnya baik secara agama maupun secara hukum positif.

Terdapat beberapa syarat untuk melangsungkan perkawinan. Persyaratan tersebut terdiri dari syarat yang ditentukan secara syar'i (syariat Islam) bagi pasangan muslim dan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan Persyaratan administrasi perkawinan tersebut, tidak semua mempelai dapat dengan mudah memenuhinya. Ada indikasi sebagian mempelai mencari cara agar maksud perkawinannya dapat terlaksana termasuk dengan membuat/meminta bantuan pihak lain dalam membuat dokumen guna memenuhi persyaratan administratif perkawinan dengan cara memalsukan dokumen persyaratan administrasi.

Pemalsuan persyaratan administrasi perkawinan dapat terjadi dalam bentuk pemalsuan kartu tanda penduduk, akta lahir, akta cerai, surat keterangan, atau dokumen lainnya yang diperlukan sebagai persyaratan untuk mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk penelitian yang berjudul “Tindak Pidana Pemalsuan dokumen dan Persyaratan Administrasi Perkawinan Dikaji Menurut Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah latar belakang terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen dan syarat administrasi perkawinan?
2. Bagaimana dampak hukum adanya tindak pidana pemalsuan dokumen dan syarat administrasi perkawinan?
3. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh masyarakat atas tindak pidana pemalsuan dokumen dan syarat administrasi perkawinan?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian hukum normatif, didasarkan pada alasan karena berkaitan dengan “Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dan Persyaratan Administrasi Perkawinan Dikaji Menurut Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri dan menelaah literatur atau penelitian yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka dengan mempelajari buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum yang bersumber dari internet, Kantor Urusan Agama, contoh-contoh kasus di lapangan, dan lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen dan Persyaratan administrasi Perkawinan.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sekarang, berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen dan persyaratan administrasi perkawinan dikaji menurut Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan dilihat dari pendekatannya, maka penelitian

ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dan mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS

1. Tindak Pidana

Pengertian atau istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang dengan mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana (Amir Ilyas, 2012).

Penjelasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat kejelasan dari maksud *strafbaar feit* tersebut, Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum bawa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana) (Sudarsono, 2007).

Beberapa ahli mengemukakan mengenai definisi tindak pidana, Menurut Pompe *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum (Erdianto Effendi, 2014).

Selanjutnya E. Utrecht mengemukakan bahwa *strafbaar feit* merupakan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Ahli hukum lainnya mengemukakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2008). Sementara menurut Wirjono Prodjodikoro definisi ‘tindak pidana’ atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan *strafbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia, dalam bahasa asing disebut *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana dan pelakunya ini merupakan subjektindak pidana (Wirjono Prodjodikoro, 2008).

Berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Konsekwensi dari definisi para ahli memberikan arti bahwa setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku dapat dikatakan sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana menjadi kejahatan (*misdriften*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Sebenarnya pengertian antara kejahatan dan pelanggaran adalah sama, yaitu sama-sama merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hukum, sama-sama merupakan tindak pidana (perbuatan pidana).

2. Kejahatan Pemalsuan Surat

Salah satu jenis kejahatan yang dikenal dalam KUHP adalah kejahatan pemalsuan surat, pada awal pembentukan peraturan yang berhubungan dengan pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran suatu surat atau akta otentik.

Surat dalam ketentuan tersebut adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lain. Selain itu, surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang (Nor Aufa, 2017):

- a. Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll);
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dsb);
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
- d. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi).
- e. Kebenaran pada suatu surat atau akte otentik sendiri sendiri terdiri atas 4 macam, yaitu :
 - 1) Surat atau akte yang menimbulkan suatu hak;
 - 2) Surat atau akte yang menerbitkan suatu perikatan;
 - 3) Surat atau akte yang menimbulkan pembebasan utang; dan
 - 4) Surat atau akte yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.

Terhadap surat atau akte, maka perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) atau tindakan perbuatan memalsu (*vervalsen*). Perbuatan membuat surat palsu adalah suatu perbuatan atau tindakan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu.

Surat yang dihasilkan dari perbuatan sebagaimana tersebut di atas dapat dikategorikan dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu (Nor Aufa, 2017). Secara umum Kejahatan pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai Pasal 275.

Tindak pidana merupakan suatu masalah yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, baik dalam masyarakat yang masih berbudaya primitif sampai dengan masyarakat yang berbudaya modern. Salah satu tindak pidana yang terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pemalsuan dokumen dan persyaratan administrasi perkawinan. 3 (tiga) faktor yang menyebabkan individu memalsukan dokumen dan syarat-syarat perkawinan:

a. Surat-Surat Tidak Lengkap

Perkawinan merupakan salah satu proses kehidupan dalam menuju masyarakat yang sempurna. Namun perkawinan juga merupakan suatu hal yang mempunyai dasar-dasar hukum. Jadi perkawinan bukan suatu permainan, karena perkawinan mempunyai kedudukan hukum, baik hukum menurut Hukum Islam maupun menurut Undang-Undang. Oleh karena itu perkawinan harus didaftarkan dan dicatatkan pada lembaga yang berwenang.

Pendaftaran dan pencatatan perkawinan harus dilakukan setiap mempelai sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Undang-undang telah menentukan persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi setiap calon mempelai ketika akan mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya sehingga perkawinannya kelak dapat memperoleh jaminan hukum dari pemerintah.

Persyaratan dalam bentuk surat-surat yang harus dilengkapi calon mempelai tersebut ada yang harus dikeluarkan oleh desa atau kelurahan, diantaranya pemberitahuan kehendak nikah (N1), Keterangan Asal-usul (N2) dan keterangan orang tua (N4) yang sering disebut “NA” di masyarakat. Pihak desa atau

kelurahan tentunya tidak akan mengeluarkan surat-surat tersebut jika calon mempelai tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga atau calon mempelai merupakan pendatang dari daerah lain.

Pendatang yang merasa kesulitan dalam mengurus persyaratan perkawinan ada yang mengambil jalan pintas untuk melengkapi persyaratan perkawinan dengan membuat surat "NA" palsu karena keengganannya kembali ke daerah asal untuk mengurus persyaratan perkawinan.

b. Calon Mempelai Masih Dibawah Umur

Adanya pembatasan usia kawin yakni calon mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun mengandung maksud bahwa calon suami istri itu harus matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Bagi calon mempelai di bawah ketentuan umur tersebut yang tetap ingin melangsungkan perkawinannya maka mereka harus mengajukan dispensasi dari pengadilan.

Pada kenyataannya di lapangan terdapat masyarakat yang tetap ingin melangsungkan perkawinan calon mempelai di bawah umur tanpa harus mengajukan dispensasi ke pengadilan yaitu dengan cara mengubah tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk dan Akta lahir.

c. Salah Satu Calon Masih Terikat Perkawinan Dengan Pihak Lain

Salah satu persyaratan pendaftaran pernikahan adalah surat pemberitahuan kehendak nikah (N1). Pengisian surat pemberitahuan nikah (N1) sangat rentan dengan pemalsuan berkaitan dengan status pernikahan karena dalam form N1 terdapat status perkawinan mempelai. Misalnya : pada Lembaran N1, status calon suami sebenarnya adalah seseorang yang masih memiliki status sah sebagai suami dalam perkawinan pertama, akan tetapi pada saat pengajuan perkawinan kedua, calon suami tersebut mampu menunjukkan bukti KTP dan KK yang menunjukkan dirinya masih berstatus perjaka dan belum terikat perkawinan. Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena praktek-praktek pembuatan KTP maupun KK asli tapi

palsu (aspal) masih marak dan berani secara terbuka menawarkan jasanya sebagaimana halnya pernah terjadi di sukabumi (*No Title*, n.d.-a).

Menyembunyikan status perkawinan sebelumnya juga dapat dilakukan dengan membuat akta cerai palsu bahkan terdapat pemalsuan akta cerai lengkap dengan pemalsuan putusan dari Pengadilan Agama. Hal ini dilakukan oleh sindikat pemalsu dokumen yang juga melakukan pemalsuan dokumen lain selain akta cerai (*No Title*, n.d.-b).

d. Tertipu Pihak Lain

Berbagai persyaratan perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kadang dianggap berbelit dan sulit dilengkapi oleh sebagian masyarakat. Hal ini memberi peluang kepada orang yang tidak bertanggungjawab untuk menawarkan jasanya dalam mengurus pembuatan dokumen dan persyaratan nikah secara cepat walaupun dikemudian hari diketahui ternyata surat-surat tersebut palsu sehingga pendaftaran perkawinan yang bersangkutan ditolak KUA. Hal ini pernah terjadi di daerah Cicurug Kabupaten Sukabumi.

Dampak pemalsuan dokumen dan persyaratan perkawinan bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga merupakan tindak pidana yang diancam dengan Pasal 263 dan Pasal 264 maka masyarakat diharapkan mulai tumbuh kesadarannya sehingga menghindari praktek pemalsuan syarat-syarat perkawinan tersebut sedapat mungkin.

Tertib hukum menjadi tertib hukum hanya karena mengandung keadilan sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum umum. Tetapi ketertiban umum tidak niscaya mengandung keadilan, karena dapat saja dipaksa oleh suatu kekuatan (misalnya pemerintah yang otoriter) yang berkepentingan terhadap suatu keadaan yang tunduk kepadanya, ketimbang memberikan keadilan kepada masyarakat. Sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum adalah untuk menegakkan keadilan (Budiono Kusumohamidjojo, 1999).

Selaras dengan tujuan hukum secara umum, hukum pidana memberi sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum. Azas-azas dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukkan dalam satu sistem. Penyelidikan secara demikian adalah dogmatis yuridis. Peninjauan bahan-bahan hukum pidana terutama dilakukan dari sudut pertanggungjawaban manusia tentang perbuatan yang dapat dihukum (CST. Kansil, 1993).

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu *kolektiviteit* dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketenteraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat (M.Abdul Kholiq, 2002).

Selain itu, hukum setidaknya mempunyai 3 (tiga) peranan utama dalam masyarakat, antara lain:

- a. Sebagai sarana pengendali sosial.
- b. Sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial.
- c. Sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu (Soerjono Soekanto, 1986).

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri dari unsur-unsur hukum, di mana di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling mempengaruhi serta saling mengisi. Oleh karenanya, pembicaraan satu bidang atau unsur atau sub-sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari yang lain, sehingga mirip dengan tubuh manusia, unsur hukum bagaikan suatu organ yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari organ yang lain (Imi Bisri, 2001).

Sebagai suatu sistem, hukum pidana memiliki sifat umum dari suatu sistem, yaitu menyeluruh (*wholes*), memiliki beberapa elemen (*elements*), semua elemen saling terkait (*relation*) dan kemudian membentuk struktur (*structure*). Lawrence W.Friedman sebagaimana yang dikutip oleh Muzakkir, membaginya menjadi 3

(tiga) elemen, yaitu: elemen struktural (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Pada bagian lain Lawrence W. Freidman menambah satu elemen lagi, yaitu dampak (*impact*). Pandangan Lawrence W. Freidman tentang sistem hukum dikelompokkan sebagai pandangan yang luas yang memasukan elemen-elemen lain yang “non-hukum” sebagai elemen hukum (Muzakkir, 2001).

Selanjutnya berhubungan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen dan persyaratan administrasi perkawinan tentunya tindak pidana tersebut dapat menimbulkan dampak hukum. Dampak hukum atau akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum (Ishaq, 2008). Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.

Menurut Pipin Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum (Pipin Syarifin, 1999).

Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;
- b. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).

Selanjutnya akibat hukum dapat berwujud sebagai berikut (R. Soeroso, 2005):

- a. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
- b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subyek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu

berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Dijatuhkannya sanksi apabila dilakukannya tindakan yang melawan hukum.

Berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen dan persyaratan administrasi perkawinan, penulis menemukan dua dampak hukum yang timbul, yaitu dampak hukum bagi pelaku dan bagi perkawinan itu sendiri.

3. Dampak Hukum Bagi Pelaku

Hukum Pidana melindungi kepentingan yang diselenggarakan oleh peraturan-peraturan hukum privat termasuk di dalamnya perkawinan maupun peraturan-peraturan hukum publik. Hukum pidana melindungi kedua macam kepentingan tersebut dengan membuat sanksi istimewa. Sanksi pidana tersebut kadang perlu diperberat untuk pidana-pidana tertentu.

Adanya sanksi berupa pidana ditentukan oleh ada dan tidak adanya perbuatan yang tidak dikehendaki (dilarang). Suatu perbuatan yang tidak dikehendaki (dilarang) oleh masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan.

Perbuatan yang tidak dikehendaki adalah berupa perbuatan negatif. Artinya, perbuatan yang tidak dikehendaki secara tegas dinyatakan dilarang dalam peraturan perundang-undangan tertulis. Jadi pada prinsipnya, semua perbuatan itu boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Sedangkan perbuatan yang dilarang tersebut diatur dalam berbagai bentuk peraturan atau norma yang tertulis atau tidak tertulis (Muzakir, 2001). Sementara untuk penerapan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang harus dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan pidana tersebut meliputi unsur-unsur suatu kesalahan dalam tindak pidana.

Tindak pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2008). Menurut Wirjono Prodjodikoro definisi 'tindak pidana' atau dalam bahasa belandanya *strafbaar feit* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di

Indonesia, dalam bahasa asing disebut *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana dan pelakunya ini merupakan subjek tindak pidana (Wirjono Prodjodikoro, 2008).

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen dan persyaratan administrasi perkawinan dalam bentuk pemalsuan surat pada umumnya seperti pemalsuan form “NA”, pengantar, dan keterangan lainnya dapat dikenakan Pasal 263 KUHP dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun. Sedangkan pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen dan persyaratan administrasi perkawinan dalam bentuk akta otentik termasuk di dalamnya akta lahir dan akta cerai dapat dikenakan Pasal 264 KUHP mengenai pemalsuan surat yang diperberat dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.

4. Dampak Hukum Bagi perkawinan

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan dapat dibatalkan. Dalam Undang-undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pengertian pembatalan perkawinan adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah, maka perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

Batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum, batalnya perkawinan dapat diartikan rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukunnya atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama (Abd. Rahman Ghazaly, 2003).

Fungsi dari hukum adalah untuk menegakkan keadilan (Budiono Kusumohamidjojo, 1999). Secara spesifik, hukum pidana sebagai hukum publik memiliki tujuan pokok yaitu melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat

sebagai suatu *kolektiviteit* dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketenteraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat (M.Abdul Kholiq, 2002).

Guna menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat, pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen dan persyaratan administrasi perkawinan dapat diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk pertanggungjawaban pidana. Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*.

Terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen dan persyaratan administrasi perkawinan dalam bentuk surat dan akta otentik maka masyarakat selain dapat melakukan upaya hukum pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama juga dapat meminta pertanggungjawaban pelaku sesuai dengan Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Masyarakat dapat melaporkan tindak pidana pemalsuan dokumen dan persyaratan administrasi perkawinan tersebut kepada institusi yang berwenang (Polisi). Laporan oleh pelapor dilakukan secara lisan maupun tertulis, setelah itu berhak mendapatkan surat tanda penerimaan laporan dari penyidik atau penyidik.

Pemalsuan persyaratan administrasi perkawinan dalam bentuk surat secara umum dapat dikenakan Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan pemalsuan pada akta otentik dapat dikenakan Pasal 264 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.

Adapun Sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku pemalsuan dokumen dan persyaratan administrasi perkawinan merupakan sanksi pidana karena pemalsuan tersebut merupakan tindak pidana. Sanksi Pidana pemalsuan dokumen dan persyaratan administrasi perkawinan dapat dikenakan sanksi pemalsuan surat pada bentuk umumnya yang dimuat dalam Bab XII Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang sanksi Pemalsuan Surat yang diperberat.

Pemalsuan surat pada umumnya yang tercantum dalam Pasal 263 KUHPidana diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun sedangkan pada Pasal 264 memuat sanksi pemalsuan surat yang diperberat dengan ancaman sanksi pidana paling lama delapan tahun penjara.

Dengan demikian pemalsuan dokumen dan peryaratan administrasi perkawinaan yang berbentuk surat pada umumnya seperti surat permohonan nikah, keterangan asal-usul keterangan orang tua, ijin dari kedutaan, persetujuan mempelai, dapat diancam dengan Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan pidana penjara paling lama selama enam tahun.

Pemalsuan dokumen dan peryaratan administrasi perkawinaan yang berbentuk akta seperti akta lahir dan akta cerai dapat diancam dengan Pasal 264 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan pidana penjara paling lama selama delapan tahun karena akta-akta tersebut termasuk dalam akta otentik.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis Penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Latar belakang tindak pidana pemalsuan dokumen dan persyaratan administrasi perkawinan disebabkan beberapa hal, yaitu:
 - 1) Surat-surat persyaratan perkawinan calon mempelai tidak lengkap
 - 2) Calon mempelai masih dibawah umur
 - 3) Salah satu calon masih terikat perkawinan dengan pihak lain
 - 4) Tertipu oleh pihak lain
- b. Pemalsuan dokumen dan persyaratan administrasi perkawinan menimbulkan dampak hukum bagi pelaku dan bagi perkawinan itu sendiri. Dampak hukum bagi pelaku adalah dapat dituntutnya pelaku dengan Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sedangkan dampak hukum bagi perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi persyaratan.

- c. Upaya hukum yang dapat ditempuh masyarakat atas tindak pidana pemalsuan dokumen dan syarat administrasi perkawinan berdasarkan Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP yaitu dengan melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak kepolisian sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Saran

Ada pun untuk menyempurnakan permasalahan yang diteliti, maka Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatat perkawinan diharapkan lebih aktif mensosialisasikan persyaratan perkawinan yang harus dipenuhi mempelai ketika hendak menikah dan resiko apa yang ditimbulkan jika terjadi pemalsuan dokumen dan persyaratan administrasi perkawinan.
2. Bagi Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu agar lebih jeli dan teliti dalam memeriksa dan mencatat perkawinan terutama berkas persyaratan, sesuai dengan *standard operational procedure* (SOP) yang ada di KUA agar perkawinan yang dilakukan mempelai tidak cacat hukum dan dapat dibatalkan.
3. Bagi masyarakat seyogyanya mengetahui prosedur pendaftaran dan pencatatan perkawinan dan menempuh prosedur tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab dan juga harus mengetahui dengan pasti dan jelas mengenai jati diri pasangannya sehingga dapat terhindar dari korban pemalsuan dokumen dan persyaratan administrasi perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly. (2003). *Figh Munakahat*. Prenada Media.
- Amir Ilyas. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Renggang Education & Pukap Indonesia.
- Budiono Kusumohamidjojo. (1999). *Ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum*. Grassindo.
- CST. Kansil. (1993). *Pengantar ilmu hukum dan Tata hukum Indonesia* (9th ed.). Balai Pustaka.
- Erdianto Effendi. (2014). *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. Refika Aditama.
- Imi Bisri. (2001). *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan implementasi Hukum di Indonesia*. Program Pascasarjana FH-UI.
- Ishaq. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (1st ed.). Sinar Grafika.
- M.Abdul Kholiq. (2002). *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*. Fakultas Hukum UII.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Muzakkir. (2001). *Posisi Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Program Pascasarjana FH-UI.
- No Title. (n.d.-a).
- No Title. (n.d.-b). <http://www.kabar-cirebon.com/2017/08/polda-jabar-bongkar-praktik-pemalsuan-ijazah-sd-hingga-akta-cerai/>
- Nor Aufa. (2017). No Title. [www/Pengacarariau.com/2017/10/Pemalsuan-Surat-dalam-KUHP-Indonesia.Htmlm=1](http://www.Pengacarariau.com/2017/10/Pemalsuan-Surat-dalam-KUHP-Indonesia.Htmlm=1)
- Pipin Syarifin. (1999). *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Setia.
- R. Soeroso. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum* (VII). Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Rineka Cipta.
- Wirjono Prodjodikoro. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama.